

## countrybution

## BIENNALE YOGYAKARTA VII 2003

Aminudin TH Siregar, DOSEN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN ITB

# Identitas Sebagai Ideologi dan Trauma Penolakan

(BAGIAN PERTAMA DARI DUA TULISAN)

**SELAMA** penyelenggaraan *Biennale VII* digelar forum diskusi. Salah satu tema diskusi yang diangkat adalah "Memperdebatkan Identitas Lokal di Masa Global: Melihat ke Dalam" Tulisan ini merupakan makalah yang dipresentasikan Aminudin T.H. Siregar dalam diskusi tersebut dan dimuat pada hari ini dan besok.

*See that our cultural identity is molded from two essential elements. First, the element that enriches our identity, namely the national cultural heritage that we all inherited from our predecessors in our respective countries. The second element is our works today in defending our national integrity, in our promoting our creative abilities and in carrying out reformation in line with the demands of time.*

Presiden Soeharto, dalam katalog *Contemporary Art of the Non-Aligned Countries* (Balai Pustaka, 1997/1998)

## Seputar wacana identitas

Sejak gemuruh Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika (KIAS 1990-1991) lalu yang berawal dari penolakan kontingen seni rupa Indonesia dalam paradigma seni rupa kontemporer Amerika, kita diombang-ambingkan dengan masalah identitas seni rupa yang kerap digali-gali, dikutak-katik, direkonstruksi, diasumsikan, diandaikan, dirumus-rumuskan, dibayangkan, dan dipraktikkan secara politis. Bahkan anginnya terus berhembus berwujud *event* dalam proposal-proposal wacana dan praktek seni rupa Indonesia di abad ke-21 ini dan ramai diperdebatkan. Sepertinya muara persoalan seni rupa mengarah ke proses pembentukan identitas, politik representasi dan penghargaan terhadap pluralitas. Bagaimanapun hal itu akan menemui kekusutan sejauh akar persoalan

identitas, secara epistemologis dan ontologis, dikenali sekadar praktek dan wacana seni rupa yang selalu dilihat dari kacamata benar-salah, atau dugaan bahwa tegaknya otoritas terhadap penilaian estetik memberikan pengaruh untuk terus menerus menstabilkan praktek dan wacana. Disisi lain "stabilisasi" tersebut konon direpresentasikan oleh sejumlah individu maupun institusi tertentu. Namun, di saat yang bersamaan, otoritas tersebut turut menyumbang terbukanya ruang diskusi, perhatian khusus terhadap penemuan (identifikasi) media baru, dan implikasi estetikanya menyangkut penemuan konteks praktek seni rupa dengan aspek lain di luarnya.

Beberapa pertanyaan dasar segera diajukan di sini untuk sokadar menyegarkan ingatan: *Apakah yang bisa kita anggap sebagai pengetahuan untuk menganalisa atau mengkaji seni rupa Indonesia? Bagaimana proses dan konstruksinya hingga kita anggap sebagai pengetahuan? Lebih jauh lagi dan seringkali menjadi dakwaan keras: Siapakah yang memegang otoritas terhadap pengetahuan tersebut? Subyek siapa yang mengetahui pengetahuan itu? Dengan cara apa ia diproduksi, direpresentasikan, dan dikonsumsi banyak orang?*

Wacana identitas memang bukannya wacana baru. Hantu identitas (*the sounds from the past*) dari kasus-kasus polemik kebudayaan dan politik 1935 dan 1950-an, rumusan-rumusan keindonesianan seni versi S. Sudjojono, pe-

munculan studi Indonesia sebelum/pasca-Perang Dingin masih kerap digunungkan. Tapi, mungkin di seni rupa, wacana macam ini semakin *santer* pada saat bersamaan terjadinya perubahan paradigma seni rupa di luar Indonesia dekade 1970-an yang awalnya keluhan terhadap sistem penolakan *pusat* atas *pinggir*, aktivitas gerakan seniman feminis atas *identitas* maskulin, lalu berangsurnya pergeseran *pusat* ke *pinggir*, praktek internasionalisasi melalui mekanisme *biennale* dsb., soal peluang dan kesempatan individu seniman di perbatasan *seni rupa pusat*, maraknya pembentukan poros-poros baru secara kecil-kecilan di Asia Pasifik-Pan Asiatisme untuk menuju *poros utama* yang sering diduga *pusat* itu. Alih-alih, arus perubahan (entah, apakah pernah benar-benar terjadi di sana) memproduksi kesempatan, tawaran baru, *pusat baru* dan dominasi baru di tanah yang *masih* lama. Di tanah yang lama inilah pertikaian *identitas* terperosok pada *sentimen historis* bahwa seni rupa Indonesia diwakilkan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali.

Obsesi untuk turut serta dalam arus "di sana" disikapi secara politik dengan cara menggiatkan aktivitas seni rupa, menjalin kerja sama, pertukaran program, yang berperan atas lahirnya definisi-definisi baru di seni rupa Indonesia. Sebutlah, istilah (pengetahuan) seni rupa kontemporer Indonesia. "Arus perubahan di sana" turut pula menciptakan pemusatan hubungan kepada individu dan institusi tertentu yang sekaligus mengambil posisi sebagai "agen" perubahan di negerinya masing-masing dan tentu saja kemudian daerahnya masing-masing. Praktisi seni yang mengkampanyekan desentrali-

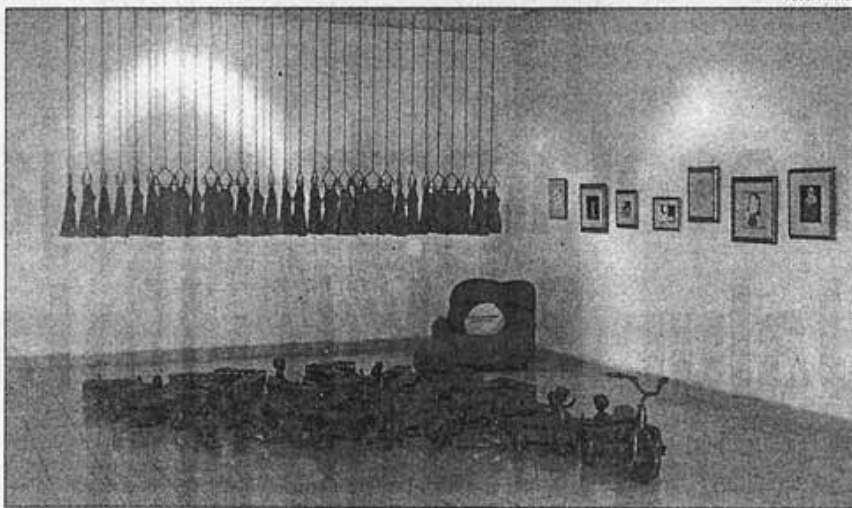


FOTO: TITANUM

**Sitting Pretty** karya Bunga Jeruk Permata Pekerti, salah satu peserta Biennale Yogyakarta VII

sasi atas pemusatan seni rupa di Pulau Jawa dan Bali memerankan dirinya sebagai agen di daerah-daerah luar Jawa-Bali tidak sekadar *distributor pengetahuan tentang seni*, meluaskan pasar, tapi juga bertanggung jawab atas politik representasi identitas.

Semakin nyata apa yang kita duga sebagai perubahan paradigma menyertakan juga apa yang kita bayangkan posisi yang disebut "pusat" dan posisi yang disebut "pinggir". Juga politik peluang dan tawaran yang diberikan sang "pusat" kepada yang "pinggir". Dalam konteks analisis wacana seni rupa Indonesia, subyek pembicara (*the speaking subject*) dikonstruksi dan mengkonstruksi *knowledge* dalam penciptaan wacana. Wacana seni rupa Indonesia bisa jadi memahami dirinya sebagai otonom dan obyektif. Tapi ini juga berarti bahwa para praktisi seni rupa dan pengetahuan tentang "seni rupa Indonesia"

ditentukan dan banyak berasal dari bentuk pengetahuan di luar Indonesia. Bayangan semu katedral seni rupa yang sering dialamatkan ke New York, California, Berlin, Paris atau Tokyo, Sydney dst. apa pun itu, resistensi terhadap yang "pusat" merupakan resistensi yang diandaikan dan dinyatakan "ada". Bahkan, resistensi oleh "subyek" di sana dijadikan "obyek" dan cenderung dijadikan elemen dasar pengetahuan (*knowledge*). Inilah yang sekurang-kurangnya menjadi spirit identitas seni rupa Indonesia, yaitu *resistensi imajiner* terhadap sistem politik representasi penolakan sang "pusat". Fiksi-fiksi resistensi, cerita-cerita penolakan paradigma, serta merta memberi implikasi spasial terhadap praktik kuratorial, pemunculan estetika yang konon murni atau terapan, juga konstruksi wacana (obyek) melalui diskusi, seminar seni, sampai soal legitimasi penye-

leenggaraan pendidikan seni rupa.

Di sisi lain, menghadapi ketidakjelasan identitas seringkali membangkitkan kembali sentimen kelompok, kesukuan, etnis, dan daerah. Diduga, etnis adalah identitas terakhir suatu komunitas dan menjadi perekat antarsesama. Di tataran politik negarabangsa, komunikasi antaretnis memang diharapkan menjadi hubungan yang dialogis. "Dialogisme", dengan demikian, adalah sebuah sikap, yang di dalamnya masyarakat diarsir, oleh warna-warni perbedaan atau *difference* (pandangan, ideologi, kepercayaan), yang tidak satu pun pihak berhak mendominasi pihak lain dengan cara pemaksaan (Yasraf Amir Piliang, 2000). Tetapi, saya yakin, menghargai perbedaan konfigurasi budaya, etnis, komunitas, kelompok, atau partai politik tidak lantas *bebas nilai*. Maksud-maksud tersebut sama saja dengan mengalih-

kan perhatian "musuh", sebab secara diam-diam menyembunyikan hasrat dominasi, kultus etnis, kelompok, atau komunitas tertentu. Menghargai perbedaan dengan sendirinya menghitung persamaan-persamaan yang selalu berbeda. Maka, berlaku pula penghayatan terhadap makna *otherness* (keoranglainan) dan *othering* (pengoranglainan) dalam kasus-kasus sosial, politik dan budaya di Tanah Air.

Yang masih disodorkan dalam wacana identitas seni rupa kita adalah hampan persoalan politik/strategi seni, otoritas praktek estetika, *pembekuan* arti seni melalui pendidikan, distributor makna via kritikus, peniruan-penjiplakan, antiorisinalitas, dan sebagian lain yang mempercayai orisinalitas, pencomotan gaya/estetika, gejala pasar, dan daya saing seniman lokal dengan seniman nonlokal. Hampan tersebut membuahakan praktek-praktek resistensi (umumnya dalam bentuk wacana), persaingan juga kerjasama, kejumudan antardaerah/teritorial, sikap-sikap apriori, peluang *exodus* (hijrah) individu secara geografis dan geokultur, bentukan solidaritas antarsesama "negara pinggir", institusi baru dan advokasi sosial-budaya.

Apa yang kita duga sebagai identitas seni rupa Indonesia merupakan praktek aktif konstruksi pengetahuan kita terhadap seni rupa itu sendiri. Kalau pada titik ini ada sebagian orang menyangka *proyek identifikasi* justru perlu berlaku dan dicanangkan, maka flogis timbul pertanyaan: sampai kapan proyek "ambisius" itu akan dirasakan banyak orang? Apakah dampak pascaindentifikasi diri? Adakah proyek identifikasi itu mengandaikan era *tinggal landas* dalam identitas seni rupa yang Indonesia? Untuk apa dan

siapakah era *tinggal landas* identitas itu? Dalam kaitan yang semakin spesifik, *seni rupa mana-kah* dan *dari "daerah" mana* yang dianggap sanggup merepresentasikan *identitas tinggal landas* itu? Apakah nanti bentuk perwakilannya bersifat tunggal?

*Cara berpikir* yang mengandaikan *progress* rupanya masih diidap sebagian orang yang disinyalir penting di wacana seni rupa Indonesia. *Cara berpikir* yang mengandaikan konstruksi seni rupa Indonesia tercapai dengan cara berangsur-angsur, dicicil-cicil, tahap demi tahap, dinyatakan berlaku secara kolektif melalui mekanisme festival, *biennale*, *triennale*, dan macam-macam saluran lain dengan hasrat mengontrol, mendikte, mewakilkan kepentingan dan pembentukan pusat-pusat lokal. Agaknya inilah *cara berpikir* sekaligus *cara mengetahui* pengetahuan seni rupa di Indonesia. Seperti singgungan sebelumnya, *cara berpikir* dan *cara mengetahui* model demikian sayangnya selalu menjadi proposal aktif untuk didistribusikan ke dalam juga ke luar negeri. Sehingga, sebagai misal, istilah *menimbang*, *meninjau*, *memandang*, *menginterupsi*, *membangun*, *menegosiasi*-*renegosiasi* tidak habis-habisnya diutamakan untuk menuai nama harum: *identitas seni rupa yang Indonesia*.

Yang ingin dituliskan di sini bahwa wacana identitas akibat penolakan-penolakan yang dilakukannya pusat terhadap karya negeri pinggir membentuk dua hal: *identitas sebagai idologi* dan *identitas sebagai trauma*. Keduanya saya kira menjadi karakter dan modal utama dalam isu identitas seni rupa yang Indonesia itu. Sekaligus, sekurang-kurangnya sebagai karakter manusia (para praktisi seni rupa) di Indonesia. ●